

## EDISI PERTAMA JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

Edisi ini merupakan penerbitan pertama Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia yang berdiri tahun 2012. Mengapa diperlukan jurnal ini? Pada pertemuan nasional II Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di Makassar tahun 2011, telah disepakati penerbitan Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Jurnal yang mengambil bentuk e-journal dan cetak (dua versi) akan dikelola oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Pertemuan di Makassar memandang perlu adanya sebuah jurnal yang fokus pada pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Apa materi jurnal ini? Dengan berfokus pada kebijakan kesehatan maka materi akan berada pada proses penyusunan kebijakan, mulai dari penyusunan ide dan agenda sampai ke evaluasi pelaksanaan kebijakan. Terkait dengan penyusunan kebijakan, ada dua kelompok topik yang dapat dicermati. Pertama adalah kelompok topik yang sudah mempunyai kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut dapat berada di level pusat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, dan sebagainya. Di level propinsi adalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan sebagainya. Demikian pula di level kabupaten/kota. Contoh topik kebijakan di kelompok ini adalah UU SJSN di tahun 2004 dan UU BPJS di tahun 2011. Kelompok kedua, adalah berbagai topik kesehatan yang belum mempunyai kebijakan. Sebagai gambaran adalah topik "*medical-tourism*" yang belum mempunyai kebijakan publik sama sekali. Kelompok ini juga studi mengenai persiapan penyusunan kebijakan publik di level Peraturan Pemerintah sebagai perintah dari sebuah UU.

Berbagai kebijakan di level internasional yang perlu dicermati ada kebijakan yang mengikat seperti Treaty, namun juga ada berbagai kebijakan di level internasional yang lebih banyak menghimbau. Kebijakan formal yang dapat dilihat berdasarkan tata hukum nasional dan internasional, dikenal pula berbagai kebijakan lokal yang informal. Gambaran kebijakan informal diberbagai kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi merupakan hal menarik untuk ditulis dalam jurnal ini. Kecocokan, dan ketidakcocokan antara kebijakan kesehatan formal dan informal di berbagai tempat merupakan isu penelitian yang menarik.

Pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang akan membaca jurnal ini? Pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang akan menulis di jurnal ini? Diperkirakan pembaca jurnal ini adalah pengambil kebijakan kesehatan di Indonesia yang berada di Kementerian Kesehatan dan berbagai kementerian terkait kesehatan. Adanya kebijakan desentralisasi, tentunya ada ribuan pengambil kebijakan di propinsi dan kabupaten yang diharapkan membaca jurnal ini. Dengan mengambil kriteria pembaca adalah level kepala bidang ke atas, maka diperkirakan akan ada 2500 pembaca di daerah dan sekitar 300 di pusat. Ada pengajar dan peneliti kebijakan kesehatan di berbagai universitas dan lembaga penelitian yang akan membaca dan sekaligus menulis artikel-artikel penelitian. Edisi pertama ini kami menghimbau para calon penulis untuk mengirimkan naskah ke Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Topik-topik naskah tersebut tentunya terkait dengan proses kebijakan yang sudah di bahas di atas. Kami tunggu naskahnya. (Laksono Trisnantoro, )